

PENDIDIKAN HUMANIS DALAM PANDANGAN PAULO FREIRE DAN KI HADJAR DEWANTARA

*Sunarso
Jurusan PKN dan Hukum, FISE, UNY.*

Abstract

Beginning about twenty years ago, humanistic education developed as a reaction to the exposure of the detrimental or unhealthy human environment in many of America's classrooms. Education, it was charged, had become a rigid, lockstep impersonal process. Critics include Goodman (1964), Gross and Gross (1969), and Silberman (1970). These critics were saying that schools (or many schools) were not fit places for human beings, Many are not even decent places for children to be. They damage, they thwart, they stifle children's natural capacity to learn and grow healthily. All too often they lead to "destruction of the human spirit". They destroy the hearts and minds of children. Holt charged that education retarded rather than facilitated learning, through instilling fear of failure, anxiety, tension, avoidance of trying and being wrong, with shame and embarrassment in front of others.

The future is not entirely bleak, however. It is not necessary to make major reforms in the system to improve the human environment of the classroom, to make them fit places for children to spend a larger portion of their lives. It is the teacher who sets the atmosphere of the classroom, and it is the teacher's attitudes and behaviors that form the learning environment of the child. These attitudes and behaviors are well known, although unfortunately they are not accorded recognition in the preparation of teachers. Many teachers are concerned, however, and interested in how they can foster the personal and affective development of their students.

Kata kunci: pendidikan humanis, pendidikan dalam pandangan Paulo Freire, pendidikan dalam pandangan Ki Hadjar Dewantara.

Pendahuluan

Pendidikan di Indonesia ternyata tidak memahami anak sebagai seorang pribadi sehingga pemahaman tentang anak didik mengalami degradasi. Degradasi itu sudah terjadi sejak akhir pemerintahan Orde Lama, tetapi sungguh sangat mencolok pada masa pemerintahan Orde Baru. Ukuran degradasi ini dibandingkan dengan masa Hindia Belanda hingga awal Orde Lama. Masa reformasi ternyata tidak mampu mengangkat pemahaman tentang siswa tersebut sehingga degradasi pemahaman masih berlangsung hingga hari ini (Anita Lie, 2006).

Siswa sungguh-sungguh dianggap sebagai anak didik oleh para gurunya, penilik sekolah, dan segala perangkat dalam institusi pendidikan pada Era yang telah disebut tadi. Mereka sungguh-sungguh bertanggung jawab terhadap anak didik secara penuh. Bahkan ketika kehidupan ekonomi mereka sangat sulit toh mereka tetap memperlakukan siswa-siswa mereka sebagai anak didik bahkan sebagai anak kandung mereka sendiri. Mereka mendidik dengan penuh kasih sayang dan kepedulian.

Perlakuan terhadap siswa yang demikian adalah tidak manusiawi dan bahkan oleh Paulo Freire dikategorikan sebagai bentuk penindasan. Oleh sebab itu menurutnya, pendidikan haruslah berorientasi kepada pengenalan realitas diri manusia dan dirinya sendiri. Pengenalan itu tidak cukup hanya bersifat obyektif atau subyektif, tetapi harus keduanya. Kebutuhan obyektif untuk mengubah keadaan yang tidak manusiawi selalu memerlukan kemampuan subyektif untuk mengenali terlebih dahulu keadaan yang tidak manusiawi.

Tidak mengherankan kalau Ivan Illich secara ekstrem mengatakan bahwa pendidikan universal melalui sistem sekolah tidaklah dapat dilaksanakan. Akan lebih mudah jika hal ini diusahakan dengan cara mendirikan lembaga alternatif yang diadakan menurut pola sekolah yang ada sekarang. Sikap baru para guru terhadap murid maupun penambahan peralatan dan gagasan pendidikan tidak akan menciptakan pendidikan universal. Usaha ke arah saluran pendidikan baru haruslah diubah menjadi penelitian pengembangan ke dalam. Jenjang pendidikan harus merupakan peningkatan kesempatan masing-masing orang untuk menjadikan setiap *moment* kehidupannya menjadi kesempatan belajar, pengamalan ilmu, dan perhatian kepada sesama.

Jauh sebelum Indonesia merdeka, Ki Hadjar Dewantara dengan Taman Siswanya mengupayakan agar anak-anak rakyat yang dididik mempunyai watak kepemimpinan dan berpengetahuan luas untuk mengembangkan kebudayaan nasional. Oleh sebab itu ia memasukkan metode kepemimpinan bagi pengembangan pendidikannya. Metode kepemimpinan dimaksud yaitu : Seorang guru adalah pamong sekaligus pemimpin, karena ia harus mampu memberi teladan *ing ngarso sung tulada*, dan mampu memberi motivasi *ing madya mangun karsa*, serta mampu memberi dorongan *tut wuri handayani*.

Menurut Ki Hadjar Dewantara, pendidikan harus dilandasi oleh sebuah filsafat pendidikan yang emansipatoris dan partisipatoris. Harus ada upaya memanusiakan manusia secara manusiawi. Anak didik seyogyanya dibimbing sesuai dengan kodrat alamnya. Pendidikan karenanya hanya sekedar memfasilitasi perkembangan bakat anak didik, sesuai dengan kodrat yang ada, dan menjaga unsur-unsur destruktif dari luar yang bisa menghambat atau bahkan membunuh bakat anak didik. Demikianlah maka Taman Siswa terkenal dengan sistem amongnya.

Pengertian Pendidikan

Darmaningtyas mendefinisikan pendidikan sebagai usaha sadar dan sistematis untuk mencapai taraf hidup atau kemajuan yang lebih baik (Darmaningtyas, 2004). Titik tekan dari definisi ini terletak pada usaha sadar dan sistematis. Dengan demikian, tidak semua usaha memberikan bekal pengetahuan kepada anak didik dapat disebut pendidikan jika tidak memenuhi kriteria yang dilakukan secara sadar dan sistematis.

Sementara ahli antropologi Indonesia Koentjaraningrat mendefinisikan pendidikan sebagai usaha sadar untuk mengalihkan adat istiadat dan seluruh kebudayaan dari generasi lama ke generasi baru (M. Said, 1989:5). Definisi yang dibuat Koentjaraningrat ini sarat dengan nuansa budaya, karena beliau adalah ahli antropologi.

Definisi dengan nuansa filosofis terlihat pada rumusan J. Sudarminta yang memaknai pendidikan secara luas dan umum sebagai usaha sadar yang dilakukan pendidik melalui bimbingan pengajaran, dan latihan untuk membantu anak didik mengalami proses pematangan diri ke arah tercapainya pribadi yang dewasa susila. Kata pendidikan sekurang-kurangnya mengandung empat pengertian, yakni sebagai bentuk kegiatan, proses, buah atau produk yang dihasilkan oleh proses tersebut, dan sebagai ilmu (Darmaningtyas, 1999:3).

Senada dengan J. Sudarminta, pakar filsafat Indonesia, N. Drijarkara juga memberikan definisi pendidikan dengan nuansa filosofis. Pendidikan dalam pandangan Drijarkara adalah suatu perbuatan fundamental dalam bentuk komunikasi antarpribadi, dan dalam komunikasi tersebut terjadi proses pematangan manusia muda, dalam arti terjadi proses hominisasi (proses menjadikan seseorang sebagai manusia) dan humanisasi (proses pengembangan kemanusiaan manusia). Dengan demikian, pendidikan harus membantu orang agar tahu dan mau bertindak sebagai manusia (N. Drijarkara, Tentang Pendidikan, Yogyakarta: Kanisius, 1980:87).

Sementara Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara, merumuskan hakikat pendidikan sebagai usaha orang tua bagi anak-anaknya dengan maksud untuk menyokong kemajuan hidupnya, dalam arti memperbaiki tumbuhnya kekuatan ruhani dan jasmani yang ada pada anak-anak (Drijarkara, 1980:4).

Perspektif yang berbeda lagi diberikan oleh tokoh pendidikan pembebasan asal Brasil, Paulo Freire. Menurut Freire, pendidikan merupakan jalan menuju pembebasan yang permanen dan terdiri dari dua tahap. Tahap pertama adalah masa di mana manusia menjadi sadar akan pembebasan mereka, dan melalui praksis mengubah keadaan itu. Tahap kedua

dibangun di atas tahap yang pertama, dan merupakan sebuah proses tindakan kultural yang membebaskan (Denis Collins, Paulo Freire: 1999: 39).

Jika kita cermati satu persatu dari definisi-definisi pendidikan di atas, terlihat dimensi yang berbeda antar definisi. Namun demikian, dari keragaman perbedaan tersebut, ada titik kesamaan yang dapat dianggap sebagai titik temu. Setidaknya titik temu tersebut diwakili oleh: aspek proses menuju kedewasaan dan memanusiakan manusia. Di luar kedua dimensi ini, memang ada kesamaan dan juga perbedaan antara satu pendapat dengan pendapat yang lainnya. Keragaman ini merupakan kewajaran dan tidak perlu diperdebatkan, sebab secara substansial sebenarnya terdapat titik temu dari beragam definisi yang ada.

Pendidikan Humanis

Pemikiran tentang pendidikan humanis bersumber dari dua aliran filsafat yakni progresivisme dan eksistensialisme. Pendidikan humanis juga mendapat dukungan dari para ahli psikologi humanistik, serta para ahli pendidikan kritis romantis (Knight, George R, 1982). Prinsip-prinsip pendidikan humanis yang diambil dari prinsip progresivisme adalah prinsip pendidikan yang berpusat pada anak (child centered), peran guru yang tidak otoriter, fokus pada keterlibatan dan aktivitas anak, dan aspek pendidikan yang demokratis dan kooperatif. Prinsip-prinsip pendidikan ini adalah sebagai reaksi terhadap pendidikan tradisional yang menekankan pada metode pengajaran formal yang kurang memberi kebebasan pada siswa, sehingga siswa menjadi tidak kreatif yang sekedar mengikuti program pendidikan yang ditetapkan oleh orang dewasa. Prinsip-prinsip dasar pendidikan tradisional yang ditolak oleh pendidikan humanis adalah: (1) guru yang otoriter, (2) metode pengajaran yang menekankan pada buku teks semata, (3) belajar pasif yang menekankan mengingat data atau informasi yang diberikan guru, (4) pendidikan yang membatasi pada ruang kelas sehingga terasing dari realita kehidupan sosial, (5) penggunaan hukuman fisik atau rasa takut sebagai bentuk untuk membangun disiplin (Sodiq A. Kuntoro: 2008).

Berikut ini adalah inti dari pendidikan humanis: (1) Tujuan dan proses pendidikan berasal dari anak. Kurikulum dan tujuan pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan, minat, dan prakarsa anak. (2) Anak harus aktif, guru tidak boleh memaksa. (3) Peran guru sebagai pembimbing, penasehat, dan teman belajar, bukan sebagai penguasa kelas. Tidak boleh ada pengajaran yang bersifat otoriter, tugas utama guru membantu siswa agar memiliki kemandirian dalam belajar. (4)

Pendidikan seharusnya tidak sekedar dibatasi sebagai kegiatan di dalam kelas. Pendidikan yang bermakna adalah pendidikan yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan masyarakat. (5) Aktivitas belajar harus berfokus pada pemecahan masalah. Pendidikan bukan sekedar pemberian informasi dari guru ke siswa akan tetapi belajar untuk memecahkan masalah dalam kehidupan. (6) Iklim sekolah harus demokratis dan kooperatif. Anak harus belajar untuk bekerjasama dengan orang lain serta, serta mempraktekkan demokrasi dalam kehidupannya (Sodiq A. Kuntoro, 2008:7).

Prinsip-prinsip pendidikan humanis yang diambil dari pandangan progresivisme di atas lebih menekankan individu sebagai anggota masyarakat. Sedangkan prinsip pendidikan humanis yang diambil dari pandangan eksistensialisme adalah menekankan pada keunikan siswa sebagai individu. Setiap siswa dipandang sebagai individu yang memiliki keunikan yang berbeda dengan siswa lain. Perbedaan dan keunikan dari siswa harus dihargai oleh guru. Pandangan eksistensialisme yang diambil oleh pendidik humanis adalah adanya kemerdekaan dari setiap individu untuk memilih apa yang dianggap benar bagi dirinya.

Pendidikan dan Hegemoni Negara

Pendidikan di Indonesia telah begitu lama terhegemoni oleh negara, hampir seluruh perangkat yang berkaitan dengan proses negara harus dikontrol negara. A Waidl (2000) dalam tulisannya mengungkapkan ada beberapa bentuk kontrol negara yang paling jelas dapat dilihat.

Pertama, adalah undang-undang (UU). Dalam kaitannya dengan pendidikan, negara mengeluarkan UU No. 2 tahun 1989 tentang Sistem pendidikan Nasional. Menurut beliau beberapa pasal menunjukkan dominasi negara dalam sistem tersebut. Pasal 29 (1) memberi catatan bahwa untuk kepentingan ideologi pembangunan, negara boleh memaksa siapapun menjadi pendidik. Di sini tampak arogansi negara, apapun bisa dilakukan untuk memenuhi kepentingannya, dan masyarakat tidak bisa menolak. Sementara itu pasal 38 (1) mewajibkan penyelenggaraan pendidikan dengan kurikulum nasional yang sentralistis. Kurikulum nasional disusun oleh para ahli (pendidikan dan atau non pendidikan) merupakan daftar isi materi yang sering diambil dari buku-buku teks yang ditulis para ahli. Kurikulum ini harus diimplementasikan secara nasional tanpa perlu dipertanyakan. Dalam paradigma semacam ini para pengajar di lapangan tidak dilibatkan dalam menyusunnya. Daftar materi silabus kurikulum itu dipandang sesuatu yang sudah pasti benar. Karena itu fungsi pengajar di depan kelas adalah

penyampai kebenaran tersebut kepada peserta didik. Bahkan, tidak jarang pengajar dipandang satu-satunya sumber belajar bagi peserta didik. Ia merupakan “agen” alih pengetahuan. Pasal 48 (ayat 1 dan 2) sulit diyakini kebenarannya, masyarakat seolah-olah bisa berpartisipasi dalam menyusun kebijakan pendidikan nasional, tetapi yang sebenarnya jarang terjadi. Ayat 1 menyatakan keikutsertaan masyarakat dalam penentuan kebijaksanaan materi berkaitan dengan sistem pendidikan nasional diselenggarakan melalui Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional (BPPN), yang menurut ayat 2, diangkat oleh presiden. Sementara sistem politik yang berjalan selalu menunjukkan bahwa lembaga yang diangkat presiden bertanggungjawab kepada presiden, karenanya harus menyenangkan kepentingan presiden, bukan kepada rakyat. Di sini terlihat seolah-olah ada yang memperjuangkan tetapi bila dicermati sebenarnya “menginteli” aktivitas kritis yang ada dalam masyarakat. Selanjutnya, pemerintah berhak mengawasi penyelenggaraan proses pendidikan (pasal 52), jika hal itu dilanggar akan dikenai sanksi (pasal 53). Kedua pasal ini sangat longgar dan *interpretable*. Biasanya yang paling berhak menafsirkan adalah negara. Pasal 22 mengisyaratkan perlunya sebuah kebebasan akademik dan otonomi kampus. Pasal ini sebenarnya sangat bagus berkaitan dengan proses kebebasan berpendapat dan pengembangan intelektual, jika pasal ini dijalankan, pasal ini sudah memberikan sebuah jaminan bahwa dicelah-celah kampus akan muncul intelektual kritis. Kenyataannya tidak demikian dalam pelaksanaannya. Perbincangan ilmiah yang sedikit menyinggung permasalahan politik minimal akan “diinteli” atau dibubarkan. Waktu lampau tidak jarang keamanan meminta rektor untuk memberi daftar mahasiswa kritis, atau datang langsung ke kampus untuk menciduk elemen kampus yang radikal.

Kedua, sebagai konsekuensi, ketetapan sentralisasi kurikulum, materi, dan referensi proses pendidikan dirumuskan oleh negara. Masyarakat tidak berhak usul untuk pemberdayaan pendidikan, karena yang paling tahu kebutuhan masyarakat adalah negara. Tidak penting apakah isi kurikulum mengingkari individualitas, karena yang dipentingkan adalah komunalisme bernegara. Untuk mengokohkan kontrol atas materi, negara menciptakan mata pelajaran yang bersifat ideologis yang sesuai dengan yang diinginkan negara, seperti pengalaman panjang di materi PMP. Sejarah Nasional, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB). Cara berpikir tentang kehidupan politik tidak boleh merupakan wacana alternatif di luar yang ditetapkan negara. Sehingga peserta didik diajak meyakini dan meresapi materi yang berisi ideologi yang diarahkan negara. Dalam kurikulum yang sudah tersentralisir ini, metode yang digunakan dalam

pendidikan tidak boleh berpotensi menjadi embrio perlawanan terhadap negara. Semua harus diarahkan pada ketundukan kepada negara secara total. Walaupun metode belajar mengajar bervariasi namun cara berpikir sudah terkooptasi dalam ideologi integralistik negara. Karena pendidikan ditujukan bagi suksesnya kehendak negara, dengan sendirinya pendidikan bukan merupakan upaya pemberdayaan yang ditujukan kepada peserta. Siswa bukan merupakan subyek pendidikan yang dikembangkan kemampuannya, melainkan sebagai obyek program negara yang bernama pendidikan, yang penting adalah kepatuhan dan loyalitas.

Ketiga, guru bukanlah manusia yang bebas mengajarkan sesuatu yang diyakininya, melainkan ia harus merupakan agen yang menyampaikan keinginan-keinginan negara melalui bahan ajar yang diberikan terutama mata pelajaran yang sarat dengan ideologi negara. Untuk mencapai maksud tersebut, sejak awal guru harus “dibina” dan “didisiplinkan” dengan peraturan-peraturan. Loyalitasnya pada negara dituntut tanpa *reserve*, sehingga guru sangat takut pada atasannya yang mengurus nasib mereka (dalam hal ini, Kanwil Departemen Pendidikan). Cara seperti ini memang efektif untuk mensosialisasikan (baca: memaksa) pandangan negara. Akibatnya, guru lebih banyak menekan kebebasan ekspresi siswa, sebab guru sendiri ditekan untuk berekspresi. Guru merupakan wakil negara dan aparat negara di dalam kelas. Jika sudah demikian, pendidikan bukan merupakan wahana saling belajar antara guru dan siswa sebagai civitas pengetahuan untuk mencapai kebaikan masa depan, melainkan wahana penindasan dari kelompok dominan. Harapan pendidikan sebagai latihan kebebasan dan keadilan nampaknya menjadi mustahil.

Tidak puas dengan kontrol terhadap sistem, kurikulum, dan guru sebagai bentuk *keempat*, negara masih melakukan kontrol langsung dalam proses pendidikan itu sendiri. Negara ikut mengawasi diskusi-diskusi dan segala bentuk kegiatan ilmiah yang dilakukan civitas akademika termasuk mahasiswa. Jika momen ilmiah dianggap mengganggu berlangsungnya kekuasaan, negara akan langsung turun tangan menertibkan. Walaupun kondisi saat ini sedikit demi sedikit telah terjadi perubahan sejak reformasi dan pergantian beberapa kepala pemerintahan, namun hegemoni negara yang begitu kuat dan dalam telah tertanam dalam dunia pendidikan masih susah untuk dilepas, karena menjadi bagian dari tingkah laku mereka yang ada di dalamnya. Seperti yang dikemukakan Femia (Hendarto, 1993) pada awalnya kebijakan-kebijakan tersebut dilaksanakan karena ada penekanan dan sanksi yang menakutkan, kemudian menjadi kebiasaan dan selanjutnya menjadi kesadaran akan suatu konsensus yang harus dijalankan. Inilah yang

disebut oleh Gramsci sebagai Hegemoni Negara.

Pendidikan : Memanusiakan Manusia

Proses pendidikan mencakup proses hominisasi dan humanisasi (Tilaar, 1999:171). Di dalam proses hominisasi dimaksudkan adanya pengembangan manusia sebagai makhluk hidup. Makhluk manusia harus dibesarkan agar supaya dapat berdiri sendiri dan memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti kehidupan biologis dan ekonomis. Dengan proses humanisasi, berarti manusia itu bukan hanya sekedar dapat hidup dan makan, tetapi juga bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan terhadap kesejahteraan masyarakatnya. Oleh sebab itu, manusia harus belajar untuk bertanggung jawab, mengenal dan menghayati serta melaksanakan nilai-nilai moral (*knowing is doing*).

Manusia adalah makhluk yang perlu dan mampu berkembang, tidak hanya secara kuantitatif, melainkan juga secara kualitatif. Menurut Freire (Nuryatno, 2007) manusia adalah *incomplete and unfinished beings* (makhluk yang belum lengkap dan belum selesai). Untuk itulah, manusia dituntut untuk selalu berusaha menjadi subjek yang mampu mengubah realitas eksistensialnya. Menjadi subjek atau makhluk yang lebih manusiawi dalam pandangan Freire, adalah panggilan ontologis manusia (*ontological vocation*). Sebaliknya, dehumanisasi adalah distorsi atas panggilan ontologis manusia. Filsafat pendidikan Freire bertumpu pada keyakinan, bahwa manusia secara fitrah mempunyai kapasitas untuk mengubah nasibnya.

Kemanusiaan merupakan sebuah nilai kodrati yang menjadi landasan sekaligus tujuan pendidikan. Kemanusiaan bersifat universal, global, di atas semua suku, aliran, ras, golongan, dan agama. Pada dasarnya, setiap manusia secara inheren memiliki nilai-nilai kemanusiaan (Dawam, 2003:104). Yaitu nilai-nilai yang sesuai dengan hati nurani yang paling dalam. Nurani adalah hakim yang paling jujur, adil, berwawasan, dan tidak berkepentingan apa-apa, kecuali kepentingan kemanusiaan itu sendiri. Dengan nilai-nilai kemanusiaan yang universal inilah kemudian dibangun institusi pendidikan yang tidak bersifat eksploitatif, mendominasi, dan kompetisi sebeb-bebasnya. Orientasi yang demikian diharapkan memunculkan manusia yang humanis tanpa kehilangan jati dirinya sendiri.

Dimensi manusia pada dasarnya merupakan potensi-potensi yang dimiliki manusia sejak lahir, dan dalam perkembangannya, ia senantiasa ada dalam dirinya (Dawam, 2003:64). Manusia memiliki dimensi yang seharusnya dikembangkan secara seimbang, namun realitas membuktikan

bahwa banyak orang yang hanya mengembangkan dan meningkatkan kualitas dimensi tertentu. Pengembangan semua dimensi secara seimbang adalah satu-satunya jalan yang tepat. Kemanusiaan manusia pada dasarnya adalah pengakuan akan pluralitas, heterogenitas, dan keragaman manusia itu sendiri.

Tanpa tanggung jawab tidak mungkin tercipta suatu masyarakat yang aman dan tenteram di mana kepribadian dapat berkembang. Manusia dianggap sebagai makhluk yang mempunyai potensi yang tidak terbatas (Tilaar, 1999:172) di dalam arti bahwa manusia tidak mengenal dan mungkin tidak bisa mengenal semua potensi yang ada pada makhluk manusia. Proses humanisasi merupakan suatu proses yang terbuka, di mana manusia dapat menguasai ilmu pengetahuan serta penerapannya. Proses hominisasi dan proses humanisasi merupakan suatu kesatuan yang terjadi dalam kehidupan kebudayaan yang mengandung unsur-unsur universal, partikular, dan global. Potensi itu dapat dikembangkan melalui proses pendidikan.

Agar berkembang menjadi manusiawi, manusia membutuhkan pendidikan. Esensi pendidikan adalah humanisasi/mamansiasi/memartabatkan manusia dengan pengembangan berbagai macam kemampuan, bakat, dan potensi yang dimilikinya secara maksimal. Karena kekhasan manusia terutama terletak pada perasaan, akal, dan hati nurani, maka pendidikan atau humanisasi haruslah menyentuh segi-segi yang khas pada manusia itu (Hadiwardoyo dalam Sindhunata, 2000:81). Dalam proses humanisasi, berperanlah banyak orang dari berbagai pihak, yaitu : orang tua, guru, teman bergaul, masyarakat, dan media massa.

Karena maksud awal pendidikan adalah pemberdayaan bagi manusia dalam menghadapi kehidupan, maka pemahaman tentang wacana kemanusiaan secara utuh merupakan keniscayaan (Waidl dalam Atmadi, 2000:21). Memahami manusia bukanlah pekerjaan yang mudah. Perbincangan tentang manusia itu sendiri juga dinamis, berkembang dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan peradaban yang tak kunjung usai. Sampai-sampai Gabriel Marcel menyatakan bahwa manusia bukanlah problema yang akan habis dipecahkan, ia adalah misteri yang tak mungkin disebutkan sifat dan cirinya secara tuntas.

Ada beberapa prinsip yang bisa menjelaskan tentang manusia bagi kepentingan pendidikan (Waidl dalam Atmadi, 2000:22), yaitu : 1) Manusia memiliki sejarah, 2) Manusia adalah makhluk dengan segala individualitasnya, 3) Manusia selalu membutuhkan sosialisasi di antara mereka, 4) Manusia mengadakan hubungan juga dengan alam sekitarnya, dan 5) Manusia dalam kebebasannya mengolah alam pikir dan rasa. Dari kelima wacana kemanusiaan tersebut

pendidikan diselenggarakan. Agar wacana kemanusiaan tetap dikedepankan dalam pendidikan, kurikulum harus menyajikan materi yang memungkinkan bagi tumbuhnya sikap kritis bagi peserta pendidikan.

Salah satu prinsip dasar yang relevan adalah bahwa pendidikan yang baik ialah pendidikan yang mempersiapkan para siswa untuk menghadapi kehidupan. Pendidikan yang baik tidak hanya mempersiapkan para siswa untuk suatu profesi atau jabatan, tetapi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya dalam kehidupan. Kelanjutan dari kebijakan pendidikan ini ialah para siswa harus dipersiapkan untuk menghadapi tiga tugas kehidupan (Buchori, 2001:50), yaitu : 1) Untuk dapat hidup (*to make a living*), 2) Untuk mengembangkan kehidupan yang bermakna (*to lead a meaningful life*), dan 3) Untuk turut memuliakan kehidupan (*to ennoble life*). Mengarahkan pendidikan hanya untuk memenuhi tuntutan lapangan pekerjaan, membuat sekolah tidak lebih sekedar sebagai pabrik robot.

Paulo Freire (Nuryatno, 2007), seorang humanis-revolusioner, menunjukkan kecintaannya yang tinggi kepada manusia. Dengan kepercayaan ini, ia berjuang untuk menegakkan sebuah dunia yang *less ugly, less cruel, less inhumane*. Seperti diketahui, arah politik pendidikan Freire berporos pada keberpihakan pada kaum tertindas (*the oppressed*). Kaum tertindas ini bisa bermacam-macam, tertindas rezim otoriter, tertindas oleh struktur sosial yang tidak adil dan diskriminatif, tertindas karena warna kulit, gender, ras, dan lain sebagainya.

Pendidikan untuk Semua

Tugas utama pendidikan sebenarnya mengantarkan peserta didik menjadi subjek. Idealitas dapat dicapai jika proses pembelajaran mengandaikan relasi antara guru/dosen dan peserta didik yang bersifat subjek-subjek, bukan subjek-objek. Tetapi konsep ini tidak berarti hanya menjadikan guru sebagai fasilitator *an sich*, karena guru harus terlibat (bersama-sama peserta didik) dalam mengkritisi dan memproduksi ilmu pengetahuan (Nuryatno, 2007). Guru dalam pandangan Freire tidak hanya menjadi tenaga pengajar yang memberi instruksi kepada anak didik, tetapi mereka harus memerankan dirinya sebagai pekerja kultural (*cultural workers*). Mereka harus sadar, pendidikan itu mempunyai dua kekuatan sekaligus, yaitu sebagai aksi kultural untuk pembebasan atas dominasi dan hegemoni, serta sebagai medium untuk memproduksi sistem sosial yang baru atau sebagai medium untuk mereproduksi status quo.

Jika pendidikan dipahami sebagai aksi kultural untuk pembebasan, maka pendidikan tidak bisa dibatasi fungsinya hanya sebatas area pembelajaran di sekolah. Ia harus diperluas perannya dalam menciptakan kehidupan publik yang lebih demokratis (Nuryatno, 2007). Untuk itu dalam pandangan Freire, harus ada semacam kontekstualisasi pembelajaran di kelas. Teks yang diajarkan di kelas harus dikaitkan dengan kehidupan nyata. Pelajaran yang bisa ditarik dari Freire untuk konteks pendidikan kita paling tidak adalah komitmennya terhadap kaum marjinal. Jika kita memakai perspektif Freirean, kunci utama agar kelompok marjinal bisa menjadi subjek yang otonom dan bisa mengkritisi realitas eksistensialnya adalah dengan cara mengembangkan kesadaran kritisnya dan mentransformasi struktur sosial yang tidak adil. Kaum marjinal harus diyakinkan bahwa mereka berhak dan mampu menentukan nasib sendiri, berhak mendapatkan keadilan dan melawan segala bentuk diskriminasi.

Untuk mencapai tujuan tersebut, proses yang harus ditempuh harus mengandaikan dua gerakan ganda, yaitu dengan meningkatkan kesadaran kritis peserta didik sekaligus berupaya mentransformasikan struktur sosial yang menjadikan penindasan itu berlangsung. Sebab, kesadaran manusia itu berproses secara dialektis antara diri dan lingkungan. Ia punya potensi untuk berkembang dan mempengaruhi lingkungan, tetapi ia juga bisa dipengaruhi dan dibentuk oleh struktur sosial atau milieu tempat ia berkembang. Untuk menghadang laju kapitalisasi pendidikan, ada dua pilihan yang dapat dilakukan dalam upaya rekayasa sosial, yaitu dengan strategi kultural dan dengan strategi struktural. Dua strategi tersebut bukanlah suatu yang saling menegasikan dan tidak bersifat oposisi biner, artinya keduanya bisa saling melengkapi.

Kini tampak mengemuka pentingnya teologi politik pendidikan yang mampu membebaskan kaum marginal dari "ketertindasan". Konstruksi sosial yang kurang adil dan memberikan peluang terhadap tumbuhnya eksklusivitas pendidikan bagi kaum kaya harus dihilangkan. Sementara, etos komunalitas yang mengusung empati atas sesama manusia dan kebersamaan dalam membangun pilar-pilar pendidikan yang berkeadilan sosial harus menjadi komitmen bersama. Dengan demikian, universalitas pendidikan yang terkandung dalam UUD 1945 dan UU Sisdiknas dapat difungsikan sebagai upaya memperkecil celah disparitas pendidikan yang kerap merugikan kaum marjinal (Mulyana, 2007).

Disparitas pendidikan tentu harus diatasi agar pemerataan kesempatan pendidikan dapat dirasakan banyak pihak, khususnya anak-anak yang termarginalkan. Untuk itu, beberapa hal strategis yang perlu dilakukan (Mulyana, 2007) :

1. Membuka akses pendidikan bagi masyarakat terpencil yang terkucilkan secara geografis maupun sosio-kultural. Upaya yang perlu dilakukan dengan menggiatkan kembali sekolah kecil, sekolah terapung, sekolah terbuka, sekolah satu atap, dan sejenisnya yang sesuai dengan kebutuhan lokal.
2. Membuka kesempatan pendidikan bagi siswa dari keluarga miskin dan kurang beruntung dengan cara memberikan beasiswa pada anak-anak yang berprestasi. Melalui cara ini, kesempatan belajar bagi anak keluarga miskin diharapkan semakin terbuka.
3. Memberikan kesempatan pendidikan kepada anak penyandang cacat yang tereksklusif dari hak pendidikannya. Model pendidikan inklusif dalam arti menyatukan mereka dengan anak-anak normal akan mengurangi terjadinya disparitas pendidikan yang diakibatkan oleh difabilitas individu.
4. Memberikan kesempatan pendidikan kepada setiap anak tanpa membedakan aspek gender. Karena itu, akses pendidikan bagi anak perempuan yang cenderung tidak lebih baik dari anak laki-laki perlu diperluas. Demikian pula anggapan yang terkonstruksi secara sosial tentang perbedaan akses pendidikan antara perempuan dan laki-laki harus dihindari.
5. Menyelenggarakan program wajar dikdas 12 tahun untuk memperluas pemerataan dan akses pendidikan bagi peserta didik tingkat sekolah lanjutan tingkat atas (SMA). Program ini dinilai strategis mengingat anak lulusan SMA akan memasuki usia produktif, sementara beban biaya sekolah yang harus ditanggung keluarga tidak mampu masih cukup tinggi.
6. Merealisasikan amanat UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 tentang anggaran pendidikan yang mencapai 20%. Hingga kini tuntutan anggaran tersebut belum secara serius dipenuhi dari APBN maupun APBD sehingga pemerataan pendidikan belum benar-benar proporsional. Penyisihan anggaran dari APBN yang hanya kurang lebih 7% tampaknya telah melahirkan varian persoalan dalam bidang pendidikan.
7. Menegaskan kembali pentingnya orang-orang kaya dalam membantu kaum miskin. Kocek tebal konglomerat sudah saatnya disisihkan untuk membantu orang-orang tak berdaya. Sebab pada hakikatnya kepemilikan kekayaan itu hanyalah kepemilikan sementara waktu yang tidak terlepas dari peran-peran orang miskin.

Tujuh hal tersebut penting dijadikan prioritas pemerataan kesempatan pendidikan agar tidak ada lagi anak yang ketinggalan. *No child left behind*, itulah semestinya yang harus menjadi

perhatian utama pemerintah dan rakyat kaya dalam merealisasikan amanat UUD 1945 dan UU Sisdiknas yang telah menjadi kesepakatan bersama. Di tengah-tengah keprihatinan yang dialami oleh bangsa ini, semua pihak harus tetap optimis untuk terus menerus memperjuangkan HAM, demi kemajuan dan pemerataan pendidikan.

Pendidikan Kritis Paulo Freire

Paulo Freire dilahirkan di Recife, Brasil bagian timur laut pada 19 september 1921. Paulo Freire wafat tahun 1997. Kiprahnya dalam dunia pendidikan cukup luar biasa terkenal dan fenomenal di tingkat internasional. Slogan yang dibangun oleh Paulo Freire, Pendidikan untuk orang tertindas adalah pendidikan yang harus dilaksanakan dengan, bukan untuk, kaum tertindas (individu atau manusia secara keseluruhan) dalam perjuangan tanpa henti untuk meraih kembali kemanusiaan mereka. Pendidikan ini membuat penindasan dan penyebabnya menjadi objek refleksi kaum tertindas, dan dari refleksi itulah lahir pembebasan (Paulo Freire, 1982: 25).

Paulo Freire merupakan salah satu penulis penting dan berpengaruh mengenai teori dan praktik pendidikan kritis abad ke-20. Fokusnya pada peran pendidikan dalam perjuangan kaum tertindas dicirikan dalam meramu dan mengawinkan konsep-konsep pendidikan yang sangat praktis untuk dikerjakan dalam rangka menuntaskan kebodohan di Brasil. Dengan komitmen politik dan pandangan radikalnya yang bersatu dalam kesederhanaan hidupnya, ditambah dengan pandangan etika yang sangat kuat dan koherensi intelektual yang sangat mengesankan, menjadikan seorang Paulo Freire tetap konsisten dalam memperjuangkan hak-hak pendidikan masyarakat tertindas.

Keterlibatan Freire dalam memperjuangkan pendidikan masyarakat tertindas sangat luar biasa, dia hidup bersama para petani dan buruh di wilayah miskin Brasil Timur Laut. Di sanalah pertama kali ia mengembangkan metode. Disanalah pertama kali ia mengembangkan metodenya yang berpengaruh untuk menghadapi persoalan buta huruf. Bahkan di beberapa negara lain, seperti Chili, Angola, Mosambik, Nikaragua dan beberapa negara lain. Freire ikut terlibat dalam memberantas buta huruf. Saat itu ia diasingkan dan ditahan di Chili pascakudeta militer 1964. Tahun 1979 Freire kemudian kembali ke Brasil setelah mendapatkan amnesti dari pemerintah Brasil. Tak pelak, ia pun kemudian masuk ke Partai Buruh dan menjadi tokoh utama kebijakan pemberantasan buta huruf. Pasca kemenangan Partai Buruh 1989, Freire ditunjuk menjadi Menteri Pendidikan (Moh Yamin 2008: 139).

Di bawah pengelolaannya, program-program pendidikan progresif, seperti pendidikan orang dewasa, restrukturisasi kurikulum, partisipasi masyarakat, dan seperangkat kebijakan ambisius untuk demokratisasi sekolah dikerjakan.

1. Mengubah wajah sekolah

Paulo Freire, dalam perjalanan sejarah hidupnya yang begitu peduli terhadap pendidikan secara konseptual dan praksis dalam konteks yang universal. Justru, ia memiliki keinginan-keinginan besar lain agar pendidikan mampu menjadikan sekolah sebagai media belajar mengajar yang steril dari kepentingan politik apapun yang rentan menjarah hak hidup sekolah, hak hidup guru, dan hak anak didik untuk berekspresi, Paulo Freire memberikan garis-garis pokok bagaimana sekolah dapat diwujudkan dalam dunia yang baru. Menurut Fraire sekolah dianggap baik dan berkualitas apabila ditopang oleh suasana dan keadaan yang sangat menarik minat anak didik untuk betah jika berada di sekolah. Sekolah dianggap sebagai rumah kedua yang memberikan nuansa kedamaian dan ketentraman hati. Sekolah mampu memberikan kesejukan dan penyejukan jiwa dengan demikian sempurna. Sekolah merupakan rumah yang teduh dan rindang sehingga membuat anak-anak didik tidak merasa terbebani jika berada dalam lingkungan sekolah, terlebih bila sedang berada dalam ruangan kelas saat proses belajar mengajar.

Dengan kata lain, sekolah bukanlah penjara. Paulo Fraire menghendaki sekolah betul-betul hadir sebagai rumah yang damai dan mendamaikan. Jangan seperti yang disampaikan oleh R. Tagore, "Sekolah adalah penjara". (Moh Yamin, "Sekolah adalah Penjara" (dalam Banjarmasin Pos, 17 Juli 2007). Sekolah adalah bui yang membuat para siswa tidak mandiri dan menunjukkan eksistensinya sebagai manusia otonom yang dapat mengatur dirinya. Sekolah sudah menyempitkan ruang gerak dan pikiran peserta didik dalam beraktivitas. Mereka tertindas. Sekolah membatasi setiap kegiatan yang akan dilakukan oleh peserta didik. Dengan aturan sekolah yang begitu rigid dan detail, mulai jam masuk hingga pulang sekolah beserta kurikulum sekolah yang begitu padat, menyebabkan anak didik sumpek dan stres. Mereka justru sering pusing, tidak bisa berpikir secara jernih. Ditambah lagi perangai dan sikap guru yang tidak bersahabat dan keras membuat pendidikan kurang manusiawi. Guru dengan perintahnya ibarat raja atau penguasa yang harus dituruti oleh anak didik. Jika anak didik tidak memenuhi perintah guru, akan mendapatkan sanksi. Ketika pendidikan di sekolah sudah carut marut dan cenderung

militeristik, segera keluar dari lembaga pendidikan adalah suatu hal yang sangat dianjurkan. Kondisi ini oleh Ivan Illich disebut de-schooling society (Joy A. Palmer, 2003: 331-332).

2. Reorientasi Kurikulum

Paulo Freire juga memiliki kehendak sangat kuat untuk melakukan reorientasi kurikulum secara masif, tidak setengah-setengah. Berdasarkan pengalaman yang telah dilakukan di Brasil, Freire memperkenalkan perubahan besar mengenai kurikulum.

Menurut Freire, para pendidik ketika berada dalam kelas harus memberikan materi ajar yang dekat dengan kehidupan anak didiknya, bukan sesuatu hal yang mengawang-awang. Bahasa yang digunakan juga bahasa yang mudah dipahami anak didik.

Freire ingin menggeser paradigma kurikulum yang terlalu sentral. Desentralisasi kurikulum adalah sesuatu yang penting untuk dikerjakan. Kurikulum harus mencerminkan kebutuhan dan persoalan anak didik. Pendidikan adalah dari anak didik, oleh anak didik, dan untuk anak didik. Kurikulum hadir dari anak didik, oleh anak didik, dan untuk anak didik. Dalam pengertian lain, pendidikan adalah tempat siswa-siswa dan pengalaman hidup mereka menjadi kurikulum yang selalu bersinggungan dengan guru-guru yang dapat membantu mereka bertanya dan melakukan eksplorasi siapa diri mereka sekarang dan apa yang telah terjadi sebelumnya.

3. Pendidikan yang Membebaskan

Pendidikan guru merupakan elemen penting dalam pendidikan karena tanpa seorang guru, menjadi sangat naif apabila pendidikan dapat berjalan dengan baik. Anak didik adalah makhluk yang memiliki nasib dan masa depan, peran pendidik adalah mengarahkan mereka sesuai dengan potensi dan bakat yang dimiliki. Dengan kata lain anak didik adalah makhluk yang dilahirkan sebagai sosok dengan kebebasan dan kemerdekaan untuk mewujudkan eksistensi dirinya.

Menurut Freire ada beberapa ciri mendasar yang dimiliki seorang pendidik yang membebaskan. Pertama, ia terbuka terhadap semua kritikan. Kritikan dianggap sebagai obat yang dapat menyembuhkan segala penyakit dalam pendidikan yang selalu membawa pendidikan menjadi busuk dan tidak mencerahkan anak didik.

Kedua, seorang pendidik harus merasa tidak cukup dengan ilmu yang didapatnya, sehingga secara terus menerus memiliki keinginan dan kehendak untuk terus belajar tiada henti. Ketiga, seorang pendidik tidak boleh erasa dirinya paling pintar. Seorang pendidik harus merasa

bahwa murid-muridnya menjadi sumber pengetahuan. Murid adalah sumber inspirasi yang dapat melahirkan banyak informasi untuk perbaikan pendidikan.

Keempat, seorang pendidik harus memiliki keyakinan dan optimisme tinggi, bahwa belajar itu long life education. Kelima, pendidik harus berpandangan luas dan berpikir terbuka. Keenam, seorang pendidik diharapkan selalu memperbanyak membaca realitas yang ada disekitarnya sebagai bahan ajar. Dengan demikian akan pendidikan dapat berbasis realitas. Pendidik harus rajin membaca, karena dengan banyak membaca akan memperkaya cakrawala pengetahuannya.

4. Muara Akhir Pendidikan Freire

Hakekat yang diperjuangkan dalam pendidikan adalah membangkitkan kesadaran kritis sebagai prasarat proses humanisasi atau memanusiakan manusia. Dalam pandangan Freire pendidikan tidak lain adalah proses memanusiakan manusia kembali setelah mereka mendapatkan penindasan, hegemoni.

Pendidikan di mata Freire adalah pembebasan manusia dari ketertutupan menuju keterbukaan, dari ketertiduran menuju keterbangunan dalam melihat realitas sosial yang ada, dari pesimisme menuju optimisme. Pendirian freire tersebut berangkat dari asumsi bahwa manusia dalam sistem dan struktur sosial yang ada pada dasarnya mengalami proses dehumanisasi dengan sedemikian berat karena eksploitasi kelas, dominasi gender, ataupun hegemoni dan dominasi lainnya. Freire sangat percaya bahwa tugas pendidikan adalah memproduksi kesadaran kritis untuk suatu pembebasan.

Demokratisasi pendidikan menuntut pendidik dan sekolah untuk memberikan ruang selebar-lebarnya pada setiap anak didik untuk mengaktualisasikan dirinya. begitu halnya dengan pendidik di sekolah. Pihak sekolah yang terdiri dari kepala sekolah dan segala jajarannya harus mengupayakan ruang bagi setiap pendidik agar kreatif dan produktif dalam membuat rencana pembelajaran yang dapat diimplementasikan sesuai dengan kehidupan pendidikan anak didiknya. Pihak sekolah jangan mendikte terlalu keras terhadap setiap upaya pendidik dalam menjalankan pendidikannya di ruang kelas bersama anak didiknya. Yang pasti, pendidik wajib dan harus diberikan hak sepenuhnya untuk menentukan bahan ajar yang tepat dan sesuai untuk diberikan kepada anak didiknya.

Ki Hadjar Dewantara : Sketsa dan Konsep Pendidikannya

Ki Hadjar Dewantara dilahirkan di Yogyakarta tanggal 18 Mei 1889 sebagai Putera dari KPH Suryaningrat dan cucu dari Pakualam II. Nama aslinya adalah RM Suwardi Suryaningrat. Di usia 39 tahun, ia berganti nama menjadi Ki Hadjar Dewantara. Dialah pendiri Perguruan Tinggi Nasional Taman Siswa yang didirikan pada 3 Juli 1922. Beberapa hal menarik dalam perjalanan hidupnya sebelum mendirikan Taman siswa adalah bersama Dr. Douwes Dekker dan Dr. Cipto Mangunkusumo mendirikan partai politik yang sangat revolusioner bernama Indische Partij tahun 1912. Tahun 1912 masih bersama dengan Dr. Cipto Mangunkusumo, beliau mendirikan Komite Bumiputera yang bertujuan melawan dan memprotes rencana perayaan memperingati kemerdekaan Nederland 100 tahun setelah ditindas oleh Napoleon Bonaparte dengan melibatkan rakyat Indonesia dan dengan sedikit memaksa agar mengumpulkan uang hingga ke pelosok tanah air.

Karena persoalan itulah, maka keluarlah brosur yang berisikan, “*Als ik een Nederlander was*” (seandainya aku seorang Belanda). Brosur itu merupakan buah pikiran dan pena seorang Ki Hadjar Dewantara sendiri, isinya menyatakan dengan singkat bahwa tidak selayaknya bangsa Indonesia yang ditindas oleh Belanda, justru ikut merayakan kemerdekaan bangsa yang menindasnya. Apabila dijelskan lebih mendalam, bangsa Indonesia harus menolak segala paksaan yang terus menghancurkan nama baik dan martabat bangsa yang bermartabat. Karena dianggap berbahaya, ia pun dibuang ke Bangka. Akan tetapi, atas permintaannya sendiri, ia pun dibuang ke Belanda. Namun, setelah empat tahun berselang, ia dipulangkan ke tanah air. Sekembalinya ke tanah air, ia melanjutkan aksi politiknya tahun 1919 dengan menjadi sekretaris National Indiche Partij yang dikomandani oleh Dr. Cipto Mangunkusumo, menjadi redaktur tiga majalh NIP De Beweging, Persatuan India, dan Penggugah (Moh Yamin, 2008:167-168).

Dalam pandangan Ki Hadjar Dewantara, politik tidak mampu mengubah keadaan bangsa Indonesia. Politik justru semakin melahirkan kekisruhan yang semakin besar bagi dinamika kehidupan bangsa sebelum ada penguatan pendidikan dalam tubuh bangsa ini, maka ia pun meninggalkan lapangan politik, memasuki lapangan pendidikan tahun 1921 di sekolah Adidarma milik kakaknya RM Suryopranoto.

Tanggal 3 Juli 1922, Ki Hadjar Dewantara kemudian mendirikan Taman Siswa yang awalnya bernama National Onderwijs Institut Taman siswa yang pertama di Yogyakarta. Akan tetapi dalam perjalanannya, nama tersebut diganti dengan Perguruan Kebangsaan Taman Siswa. Awalnya Perguruan Kebangsaan Taman Siswa hanya dibuka untuk Taman Anak dan Kursus

Guru saja. Yang pasti, Ki Hadjar Dewantara dalam pendidikan memperjuangkan pendidikan, selalu mendapatkan rintangan dan kendala cukup luar biasa. Tahun 1914, beliau dikenakan pajak rumah tangga. Beliau sebenarnya tidak suka membayar pajak tersebut karena keluarganya hanya menempati dua kamar di tengah-tengah bangunan perguruan tingginya. Menurut hitung-hitungan kasar, ia tidak semestinya dikenakan pajak rumah tangga karena barang-barang lebih banyak yang menjadi milik perguruan tingginya. Akhirnya, barang-barangnya disita dan dilelang di publik. Namun, setelah Ki Hajar melayangkan protes terhadap pemerintah saat itu, maka pajak itupun tidak ada lagi (Moh Yamin 2008: 169).

1. Cita-cita Pendidikan Ki Hadjar Dewantara

Dalam pendapat Ki Hadjar Dewantara, pendidikan bagi setiap anak-anak bangsa di negeri ini memiliki arti dan makna mendalam sebagai pemelihara dan pengembang benih-benih persatuan dan kesatuan bangsa yang telah dirintis oleh pendahulu bangsa Indonesia. Pendidikan merupakan tonggak berdirinya sebuah bangsa yang besar, berdaulat, berharkat, dan bermartabat. Pendidikan adalah alat yang bisa mempersatukan segala anak bangsa dalam satu wadah yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia di bawah bendera merah putih dengan ideologi Pancasila dan UUD 1945. Pendidikan merupakan bagian dari sebuah alat perdamaian menuju bangsa yang sehat lahir dan batin.

2. Panca Darma

Ada hal yang cukup menarik yang digagas Ki Hadjar Dewantara terkait Taman Siswa sebagai bagian dari perjuangan pendidikan di negeri ini, yaitu Panca Darma.

- a. Asas kemerdekaan
- b. Asas Kodrat Alam
- c. Asas Kebudayaan
- d. Asas Kebangsaan
- e. Asas Kemanusiaan

Mengutip pernyataan Ki Hadjar Dewantara dalam sebuah penggambaran, “Berilah kemerdekaan kepada anak-anak kita: bukan kemerdekaan yang leluasa, tetapi yang terbatas oleh tuntutan-tuntutan kodrat alam yang nyata dan menuju ke arah kebudayaan, yaitu keluhuran dan kehalusan hidup manusia. Agar kebudayaan itu dapat menyelamatkan dan membahagiakan hidup dan penghidupan diri dan masyarakat, maka perlulah dipakai dasar kebangsaan, tetapi jangan sekali-kali dasar ini melanggar atau bertentangan dengan dasar yang lebih luas, yaitu dasar

kemanusiaan (I Djumhur dan Danasaputra, 1976: 175-176). Oleh karenanya bila mengamati beberapa hal penting yang disampaikan oleh Ki Hadjar Dewantara mengenai pembangunan pendidikan demi kemanusiaan di bangsa ini. Maka sangat beralasan apabila Indonesia harus mengedepankan pendidikan sebagai upaya pencerdasan kehidupan bangsa.

Ki Hadjar Dewantara menginginkan bahwa pendidikan Indonesia harus mencerminkan nilai-nilai kebangsaan sendiri, jangan meniru bangsa-bangsa lain karena berbeda perspektifnya. Pendidikan harus bertumpu penguatan nalar dalam berpikir dan bermoral, beradab, dan memiliki kepekaan yang tinggi terhadap kepentingan bangsa di atas kepentingan kerdil dan sempit.

Pendidikan menurut Ki Hadjar adalah suatu hal yang mampu memberikan sumbangsih besar bagi perubahan bangsa ke depan, baik secara intelektual, sosial, maupun politik. Pendidikan diupayakan dapat membentuk karakter bangsa yang andiri, tidak menjadi bangsa yang cengeng, selalu merengek minta bantuan kepada bangsa lain.

3. Muatan Pendidikan Ki Hadjar Dewantara

Bila mengamati isi muatan pelajaran yang berada di Taman Siswa sebagai lembaga pendidikan yang digarap Ki Hadjar Dewantara, maka penting untuk diketahui publik bahwa pendidikan jangan sampai lepas dari akar sebuah perjalanan bangsa, karena pendidikan memiliki peran penting dalam mendidik anak-anak negeri. Pendidikan menjadi penguat awal dan dasar bagi seluruh perjalanan hidup anak-anak negeri dalam membangun bangsanya.

Melepaskan jeratan hegemoni asing dalam dunia pendidikan Indonesia adalah sebuah keniscayaan yang harus digelar karena jika tidak, budaya bangsa Indonesia akan tercerabut dan menjadi hilang dari kehidupan anak-anak bangsa dan mengakibatkan hilangnya identitas bangsa sendiri. Pelajaran Taman Siswa menunjukkan sifat kul;tural nasional. Tiap mata pelajaran diberikan sebagai bagian dari peradaban bangsa ketika bangsa Indonesia melakukan dialog dengan bangsa-bangsa lain.

4. Trilogi Pendidikan

Trilogi pendidikan yang dimaksud oleh Ki Hadjar Dewantara adalah bagaimana peran keluarga, sekolah, dan masyarakat mampu menjadi motor pembentukan karakter dan mentalitas anak. Yang menjadi pertanyaan adalah dari tiga kelompok tersebut, siapakah yang memiliki peran besar dalam pembentukan karakter anak? tiga kelompok tersebut sama-sama bertanggung jawab dengan pola tanggung jawab yang berbeda. Dalam lingkungan keluarga, peran orang tua

adalah menanamkan pendidikan moralitas dan tanggung jawab hidup bersikap dan bertindak yang baik dalam konteks berhubungan dengan orang lain.

5. Tut Wuri Handayani

Ajaran kepemimpinan Ki Hadjar Dewantara yang populer di kalangan masyarakat adalah *Ing Ngarso Sun Tulodo, Ing Madyo Mbangun Karso, Tut Wuri Handayani*. Secara tegas dalam pengertian tersebut, seorang pemimpin harus memiliki ketiga sifat tersebut agar dapat menjadi panutan bagi bawahan atau anak buahnya. *Ing Ngarso Sun Tulodo* menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri teladan bagi anak buahnya. *Ing Madyo Mbangun Karso*, maknanya seorang pemimpin di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat kerja anak buahnya. *Tut Wuri Handayani* Seorang pemimpin harus mampu memberi dorongan moral dari belakang agar bawahan bisa melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

Menurut Ki Hadjar, birkanlah anak didik mencari jalan sendiri selama mereka mampu dan bisa melakukan itu, karena ini merupakan bagian dari pendidikan pendewasaan diri yang baik dan membangun. Dengan demikian akan dicapai kemajuan yang hakiki. Namun pendidik harus mengawasi ke manakah mereka akan menempuh jalan. Memberikan teguran bila anak didik menyimpang dari arah yang benar.

Penutup

Pemikiran tentang pendidikan humanis bersumber dari dua aliran filsafat yakni progresivisme dan eksistensialisme. Pendidikan humanis juga mendapat dukungan dari para ahli psikologi humanistik, serta para ahli pendidikan kritis romantis (Knight, George R, 1982). Prinsip-prinsip pendidikan humanis yang diambil dari prinsip progresivisme adalah prinsip pendidikan yang berpusat pada anak (child centered), peran guru yang tidak otoriter, fokus pada keterlibatan dan aktivitas anak, dan aspek pendidikan yang demokratis dan kooperatif. Prinsip-prinsip pendidikan ini adalah sebagai reaksi terhadap pendidikan tradisional yang menekankan pada metode pengajaran formal yang kurang memberi kebebasan pada siswa, sehingga siswa menjadi tidak kreatif yang sekedar mengikuti program pendidikan yang ditetapkan oleh orang dewasa. Prinsip-prinsip dasar pendidikan tradisional yang ditolak oleh pendidikan humanis adalah: (1) guru yang otoriter, (2) metode pengajaran yang menekankan pada buku teks semata, (3) belajar pasif yang menekankan mengingat data atau informasi yang diberikan guru, (4)

pendidikan yang membatasi pada ruang kelas sehingga terasing dari realita kehidupan sosial, (5) penggunaan hukuman fisik atau rasa takut sebagai bentuk untuk membangun disiplin (Sodiq A. Kuntoro: 2008).

Inti dari pendidikan humanis adalah sebagai berikut: (1) Tujuan dan proses pendidikan berasal dari anak. Kurikulum dan tujuan pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan, minat, dan prakarsa anak. (2) Anak harus aktif, guru tidak boleh memaksa. (3) Peran guru sebagai pembimbing, penasehat, dan teman belajar, bukan sebagai penguasa kelas. Tidak boleh ada pengajaran yang bersifat otoriter, tugas utama guru membantu siswa agar memiliki kemandirian dalam belajar. (4) Pendidikan seharusnya tidak sekedar dibatasi sebagai kegiatan di dalam kelas. Pendidikan yang bermakna adalah pendidikan yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan masyarakat. (5) Aktivitas belajar harus berfokus pada pemecahan masalah. Pendidikan bukan sekedar pemberian informasi dari guru ke siswa akan tetapi belajar untuk memecahkan masalah dalam kehidupan. (6) Iklim sekolah harus demokratis dan kooperatif. Anak harus belajar untuk bekerjasama dengan orang lain serta, serta mempraktekkan demokrasi dalam kehidupannya (Sodiq A. Kuntoro, 2008:7).

Menurut Paulo Freire pendidikan bertujuan untuk memanusiakan manusia, membangkitkan kesadaran kritis dan transformatif untuk mengubah nasib kehidupan yang sedang terpuruk menuju kebangkitan, dan mengangkat masyarakat tertindas menuju ke kelas yang bermartabat dan berkemanusiaan dan memiliki hak sama dengan masyarakat lainnya baik untuk dihormati, dihargai maupun beraktualisasi diri. Sedangkan menurut Ki Hadjar Dewantara pendidikan bertujuan untuk mendidik manusia mengenal budayanya, memiliki identitas-identitas lokal yang harus ditunjukkan sebagai bentuk eksistensi diri agar tidak tercerabut dan hilang dari perwujudan dirinya secara praksis dan konkret sebagai masyarakat berbudaya. Masih kata Ki Hadjar Dewantara, pendidikan menumbuhkan semangat nasionalisme dan patriotisme guna memperjuangkan kepentingan bangsa di atas kepentingan politik yang kerdil dan sempit yang kemudian hanya mengorbankan kepentingan bangsanya. Pendidikan harus berupaya menanamkan rasa persaudaraan, persamaan, kesetiakawanan, dan kebersamaan, membela bangsa dari segala bentuk penindasan, baik secara fisik maupun psikis, tidak peduli apakah penindasan itu bersal dari luar maupun dalam. Pendidikan harus melahirkan rasa mencintai segala aset bangsa, menjaganya dengan segala cara agar dapat dimanfaatkan bagi

kebesaran dan kemakmuran bangsa. Segala aet bangsa mulai dari air, bumi, tanah dan lain-lain dapat dimanfaatkan bagi kemakmuran rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

Daftar Pustaka

- Benny Susetyo. (2005). *Politik Pendidikan Penguasa*. Yogyakarta: LkiS.
- Buchori, Mochtar. (2002). *Pendidikan Antisipatoris*. Yogyakarta : Kanisius.
- Budisaty, B. *Krisis Pendidikan dan Sekolah Unggulan*. (<http://www.suaramerdeka.com/harian/0508/23/opi4.htm>)
- Illich, Ivan. (1982). *Bebas dari Sekolah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- I Djumhur dan Danasuparta. (1976). *Sejarah Pendidikan*. Bandung: Penerbit CV Ilmu .
- Joy A. Palmer (ed). (2003). *50 Pemikir dari Piaget Sampai Masa Sekarang*. Farid Assifa, Penerj. Yogyakarta: Jendela.
- Koesoema, Doni A. *Quo Vadis Pendidikan di Indonesia*. . <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0410/26/opini/1343288.htm>
- Lie, Anita. (2006). “*Visi Pendidikan Indonesia dari Konteks Siswa*” (Makalah Seminar). Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Mansour Fakh. (2002). *Manifesto Intelektual Organik*. Yogyakarta: Institut Press.
- Mulyana, Rochmat. (2007). *Bebaskan Kaum Marjinal dari Ketertindasan Pendidikan*. (<http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2007/052007/02/1105.htm>)
- Moh Yamin. (2008). *Menggugat Pendidikan Indonesia*. Yogyakarta: penerbit Ar-Ruzz Media.
- Nugroho, Heru. (2002). *Mc. Donaldisasi Pendidikan Tinggi*. Yogyakarta : Kanisius.
- Nuryatno, Agus. (2007). *Refleksi Pendidikan Bersama Paulo Freire*. (<http://www.duniaesai.com/pendidikan/pend41.htm>)
- Paulo Freire. (2003). *Pendidikan Masyarakat Kota*. Agung Prihantoro Penerjemah. Yogyakarta: LkiS.
- Paulo Freire. (1982). *Pedagogy of the Oppressed*. Harmondsworth: Penguin.
- Sodiq A. Kuntoro. (2008). *Sketsa Pendidikan Humanis Religius* (Makalah). Yogyakarta: FIP UNY.

Sindhunata. (2000). *Menggagas Paradigma Baru Pendidikan : Demokratisasi, Otonomi, Civil Society, Globalisasi*. Yogyakarta : Kanisius.

Tilaar, H.A.R. (1999). *Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia : Strategi Reformasi Pendidikan*. Bandung : Remaja Rosdakarya.